

# Merenden Tedong di Mamasa: Integrasi Pendekatan Struktural dan Kultural dalam Memitigasi Konflik Sosial Keagamaan

<sup>1</sup>Muhiddin Bakri, <sup>2</sup>Mahyuddin, <sup>3</sup>Silmi Qurota Ayun, <sup>4</sup>Fitriani

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Negeri Parepare

Jl. Amal Bhakti No.8, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare

E-mail: [mahyuddin@iainpare.ac.id](mailto:mahyuddin@iainpare.ac.id)

## Abstract

*The Mamasa community has the Merenden Tedong tradition which is rooted in customary law as an effective conflict resolution model in resolving social problems. This tradition is deeply rooted and has become a unique cultural icon in overcoming social challenges and conflicts in society. The integration of this traditional approach with a formal approach from the government has strengthened the mechanism for mitigating socio-religious conflict in social life. This article aims to describe the integration between two conflict resolution models, namely the cultural approach through customary law and the structural approach through government policy, as an effort to mitigate socio-religious conflict in Mamasa. This research used a phenomenological analysis approach involving in-depth interviews. Informants consisted of traditional leaders, community leaders, government officials and community members to gain a comprehensive understanding of the Merenden Tedong tradition as a model for conflict resolution. This research found that the integration of cultural and structural approaches in the Merenden Tedong tradition contributed significantly to mitigating social and religious conflict. Collaboration between traditional institutions and the government strengthened the role of customary law in conflict prevention, proving that an integrative approach is more effective than a unilateral model. Further research is recommended to explore the construction of the collective identity of Pitu Ulunna Salu as a strategy to build peace in Mamasa.*

**Keywords:** Merenden Tedong, Conflict Resolution, Integrative Approach, Mamasa

## Abstrak

*Masyarakat Mamasa memiliki tradisi Merenden Tedong yang berakar dari hukum adat sebagai model resolusi konflik yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan sosial. Tradisi ini mengakar kuat dan menjadi ikon budaya yang unik dalam mengatasi tantangan sosial dan konflik di tengah masyarakat. Integrasi antara pendekatan tradisional ini dengan pendekatan formal dari pemerintah telah memperkuat mekanisme mitigasi konflik sosial keagamaan di kehidupan sosial. Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan integrasi antara dua model resolusi konflik, yakni pendekatan kultural melalui hukum adat dan pendekatan struktural melalui kebijakan pemerintah, sebagai upaya mitigasi konflik sosial keagamaan di Mamasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis fenomenologi dengan melibatkan wawancara mendalam. Informan terdiri dari pemangku adat, tokoh masyarakat, pihak pemerintah, serta anggota masyarakat untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait tradisi Merenden Tedong sebagai model resolusi konflik. Penelitian ini menemukan bahwa integrasi antara pendekatan kultural dan struktural dalam tradisi Merenden Tedong berkontribusi signifikan dalam memitigasi konflik sosial dan keagamaan. Kolaborasi antara lembaga adat dan pemerintah memperkuat peran hukum adat dalam pencegahan konflik, membuktikan bahwa pendekatan integratif lebih efektif dibandingkan model yang bersifat unilateral. Penelitian lebih lanjut disarankan mengeksplorasi konstruksi identitas kolektif Pitu Ulunna Salu sebagai strategi membangun perdamaian di Mamasa.*

**Kata Kunci:** Merenden Tedong, Resolusi Konflik, Pendekatan Integratif, Mamasa

## Pendahuluan

Dalam sebuah negara multikultur dengan problematika berbagai ancaman kemunculan konflik, diskusi tentang resolusi konflik sosial keagamaan selalu menjadi tema yang menarik, baik dalam perspektif teori maupun praktik pendekatannya<sup>1,2</sup>. Dalam konteks ini, terdapat dua pendekatan yang memiliki peranan penting dalam proses resolusi konflik sosial seperti di Indonesia yakni, pendekatan kultural dan struktural<sup>3</sup>.

Indonesia merupakan negara yang menarik untuk dikaji pendekatan penyelesaian konfliknya karena Indonesia secara berkala mengalami kekerasan berskala besar selama dua dekade terakhir<sup>4</sup>. Para ahli telah memetakan bentuk-bentuk resolusi konflik, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman dan kekerasan. Pembahasan di kalangan cendekiawan telah menawarkan pendekatan struktural dan kultural sebagai dua paradigma utama yang dapat saling melengkapi dalam praktik resolusi konflik di level komunitas masyarakat. Sebagaimana di Mamasa, sebagai daerah yang pernah dilanda konflik sosial keagamaan berbasis etnisitas<sup>5,6</sup>, setidaknya perumusan manajemen dan resolusi konflik tidak hanya menggunakan jalan birokrasi<sup>7</sup>, tetapi juga menempatkan hukum adat sebagai instrument utama membangun keharmonisan sosial di tengah-tengah masyarakat.

Pendekatan resolusi konflik di Mamasa justru lebih dominan menggunakan pendekatan budaya, di mana pengembangan kerukunan sosial

---

<sup>1</sup> Federica Vallone et al., "Teachers' Multicultural Personality Traits as Predictors of Intercultural Conflict Management Styles: Evidence from Five European Countries," *International Journal of Intercultural Relations* 87 (2022): 51–64, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2022.01.006>.

<sup>2</sup> Sugit Arjon, "Conflict Management in Indonesia: Policy Perspective and Analysis," *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities* 8, no. 1 (2018): 1–10, [https://doi.org/Sugit Arjon, "Conflict Management in Indonesia: Policy Perspective and Analysis,"](https://doi.org/Sugit%20Arjon,%20Conflict%20Management%20in%20Indonesia:%20Policy%20Perspective%20and%20Analysis) *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*.

<sup>3</sup> Roni Ismail, "Resolusi Konflik Keagamaan Integratif: Studi Atas Resolusi Konflik Keagamaan Ambon," *Journal of Islamic Discourses* 3, no. 2 (2021): 451–69, <https://doi.org/doi.org/10.14421/lijid.v3i2.2458>.

<sup>4</sup> Suheri Harahap, "Konflik Etnis Dan Agama Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (JISA)* 1, no. 2 (2018): 1–19, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30829/jisa.v1i2.5096>.

<sup>5</sup> Zulkifli Abdullah, "Kontestasi Elit Lokal Dalam Konflik Politik Pemekaran Daerah (Studi Kasus Konflik Pemekaran Kabupaten Mamasa Di Sulawesi Barat)" (Universitas Indonesia, 2016).

<sup>6</sup> Mahyuddin Mahyuddin and Muhammad Zaldy Febry, "Representasi Identitas Agama Dalam Pilkada Sebagai Media Resolusi Konflik Etnoreligius Di Mamasa," *Palita: Journal of Social Religion Research* 8, no. 1 (2023): 109–24, <https://doi.org/10.24256/pal.v8i1.3587>.

<sup>7</sup> Tabah Maryanah, "Governance Dalam Manajemen Konflik Pemekaran Kabupaten Mamasa," *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan* 4, no. 1 (2013): 7–16.

dalam masyarakat lebih menitikberatkan pada cara-cara kearifan lokal<sup>8</sup>. Meski demikian, untuk mengukuhkan integrasi sosial masyarakat secara utuh, tetap tidak menafikan kehadiran dan peranan penting lembaga pemerintah. Hal yang lumrah ditemukan dalam setiap penyelesaian konflik sosial di masyarakat, kehadiran lembaga adat dan pemerintah bahkan agama, saling menopang satu sama lain dalam upaya memelihara perdamaian.

Masyarakat Mamasa sampai saat ini masih menempatkan persaudaraan sebagai kunci utama dalam merajut kembali hubungan sosial. Fenomena inilah yang kemudian mendorong otoritas-otoritas lokal setempat berusaha, menemukan model pendekatan yang memadukan antara pendekatan struktural dan kultural untuk menjembatani setiap permasalahan yang timbul di masyarakat. Salah satu fenomena menarik di ranah ini adalah segala konflik-konflik yang muncul di masyarakat, diurai melalui model pendekatan preventif lembaga adat melalui ritual Merenden Tedong di mana mekanisme penyelesaian konflik di masyarakat tidak hanya diinisiasi oleh pemangku adat, melainkan juga ada keterlibatan para tokoh lintas agama dan pemerintah.

Perpaduan pendekatan kultural dan struktural telah lama menjadi alternatif utama dalam menyelesaikan problem-problem sosial di masyarakat, tidak terkecuali masalah sosial yang bertautan dengan tensi di kalangan umat beragama. Kemampuan mengartikulasikan peran antarlembaga sosial, sekurang-kurangnya, segala konflik sosial yang timbul di tengah-tengah masyarakat mampu diredam dengan baik. Proses mitigasi ini telah menjadi pendekatan *problem solving* kontemporer untuk membangun perdamaian di kehidupan sosial masyarakat Mamasa.

Studi mengenai tradisi Merenden Tedong telah dilakukan oleh sejumlah ahli. Namun, kajian Merenden Tedong ditinjau dari perspektif mitigasi konflik sosial keagamaan masih sangat minim. Beberapa penelitian tentang ritual ini masih terbatas pada rekonsiliasi dan resolusi konflik<sup>9, 10, 11</sup>. Penulis tidak menemukan penjelasan secara terperinci terkait pendekatan integratif dalam membangun perdamaian dan merawat kerukunan sosial. Dengan demikian, artikel ini menjawab pertanyaan bagaimana bentuk pendekatan integratif resolusi konflik dalam ritual Merenden Tedong sebagai sebuah paradigma

---

<sup>8</sup> Hamdar Arraiyah, "Menuju Damai Dengan Kearifan Baru (Studi Kasus Pasca Konflik Di Aralle, Tabulahan Dan Mambi)," *Al-Qalam* 11, no. 2 (2018): 26–42.

<sup>9</sup> Stepanus Stepanus, Izak Y M Lattu, and Tony Tampake, "Mebulle Bai: Ritual, Ruang Bersama, Dan Rekonsiliasi Masyarakat Lokal Di Mamasa, Sulawesi Barat," *Religió Jurnal Studi Agama-Agama* 9, no. 2 (2019): 170–96, <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/religio.v9i2.1204>.

<sup>10</sup> Lattu, Izak and Tony Tampake, "Ritual Merenden Tedong Sebagai Penyelesaian Konflik Masyarakat Mamasa," *Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya* 5, no. 2 (2020): 123–35, <https://doi.org/10.24114/antro.v5i2.14392>.

<sup>11</sup> Agustinus Buntu Karaeng and Elly Esra Kudubun, "Ritual Ma'renden Tedong Sebagai Penyelesaian Konflik Masyarakat Sesenapadang," *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 4 (2024): 4242–48, <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i4.4381>.

mitigasi risiko konflik sosial keagamaan, dan strategi mitigasi risiko konflik yang ditawarkan dalam upaya menjaga kerukunan di masyarakat.

## **Metode**

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan fenomenologi<sup>12</sup>. Lokasi penelitian mengambil tempat di Kota Mamasa Sulawesi Barat. Kota Mamasa dipilih menjadi lokasi penelitian sebab daerah tersebut merupakan representasi penduduk yang beragam secara agama dan etnis namun menetapkan kerangka ritual Merenden Tedong sebagai media resolusi konflik. Tidak hanya warga lokal, masyarakat pendatang yang menetap di Mamasa juga terikat dengan aturan Merenden Tedong. Penulis melakukan wawancara eksploratif terhadap tokoh adat, agama, dan sejumlah informan yang bekerja di lembaga pemerintahan termasuk anggota masyarakat lintas etnis. Namun, wawancara lebih ditekankan pada eksplorasi mitigasi konflik sosial keagamaan melalui tradisi Merenden Tedong. Pengumpulan informasi juga dilakukan melalui literatur berkaitan dengan subjek penelitian. Hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini juga digunakan sebagai referensi. Interpretasi pemaknaan Merenden Tedong dilakukan dengan telaah wawancara dan dokumen dalam bentuk bahan tertulis berupa dokumen publikasi terkait Merenden Tedong. Pengolahan data yang diperoleh dari lapangan dikorelasikan dengan konsep resolusi konflik integratif antara pendekatan struktural dan kultural dalam praktik pengelolaan kerukunan di Kabupaten Mamasa yang pernah dilanda konflik sosial bernuansa agama.

## **Hasil dan Diskusi**

### **Pendekatan Integratif dalam Resolusi Konflik Sosial**

Pendekatan integratif resolusi konflik merupakan istilah yang menunjuk pada perpaduan dua mazhab teoritik yang dikembangkan dalam menyelesaikan realitas konflik suatu masyarakat<sup>13</sup>. Dalam lanskap ilmu-ilmu sosial humaniora, dikenal dua mazhab sebagai paradigma utama dalam proses resolusi konflik yaitu, mazhab struktural dan mazhab kultural. Kedua

---

<sup>12</sup> Amir Hamzah, *Metode Penelitian Fenomenologi; Kajian Filsafat Dan Ilmu Pengetahuan* (Malang: Literasi Nusantara, 2020).

<sup>13</sup> Roni Ismail, "Resolusi Konflik Keagamaan Integratif: Studi Atas Resolusi Konflik Keagamaan Ambon."

paradigma ini memiliki sudut pandang yang berbeda dalam melihat realitas konflik dan cara penyelesaiannya<sup>14,15</sup>.

Perbedaan mendasar kedua pendekatan ini menurut Hilmy Masdar bertolak pada justifikasi teoritiknyanya. Mazhab struktural menekankan bahwa faktor-faktor politik, sosial dan ekonomi merupakan penyebab munculnya konflik. Dengan kata lain, faktor-faktor struktural inilah yang menjadi pemicu utama munculnya konflik baik yang bernuansa agama maupun etnik. Oleh karena itu, resolusi konflik yang dicoba ditawarkan oleh mazhab struktural juga berkisar pada perbaikan struktur sosial-ekonomi politik pada masyarakat yang tengah berkonflik, seperti pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial, pemberdayaan aparat penegak hukum dan sistem keamanan negara, termasuk dibukanya kran-kran dan pranata demokrasi.

Sementara itu, mazhab kultural berpandangan berbeda dengan mazhab struktural, bahkan cenderung bertolak belakang. Asumsi teoritik yang berusaha dikembangkan dalam ulasan paradigma ini adalah, tradisi sebagai seperangkat nilai-nilai normatif yang berlaku dalam masyarakat, dapat dijadikan sebagai *guiding pattern* bagi perilaku sosial; yakni pijakan normatif bagi terciptanya harmoni sosial dalam masyarakat. Pendekatan kultural dalam resolusi konflik menekankan pentingnya memahami dan menghormati nilai-nilai, tradisi, dan norma budaya setempat. Pendekatan ini menawarkan solusi yang lebih berkelanjutan dengan melibatkan komunitas secara langsung dalam proses perdamaian<sup>16</sup>. Karena paradigma ini memperhatikan dimensi budaya, maka pendekatan ini dapat mengidentifikasi akar konflik yang lebih dalam serta solusi yang lebih tepat sesuai konteks budaya. Pendekatan kultural dapat membantu mempromosikan dialog, saling pengertian, dan kolaborasi antar pihak yang bertikai untuk mencapai perdamaian yang lebih kokoh dan inklusif<sup>17</sup>.

---

<sup>14</sup> Masdar Hilmy, "Rekonstruksi Paradigma Teori Dan Resolusi Konflik Agama-Etnik: Sebuah Diskursus Teoritik," in *Resolusi Konflik Islam Indonesia*, ed. Thoha Hamim (Yogyakarta: PT. LKis Pelangi Aksara, 2007), 25–35.

<sup>15</sup> Novri Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik Dan Isu-Isu Konflik Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2010).

<sup>16</sup> Michael W Morris and Ho-Ying Fu, "How Does Culture Influence Conflict Resolution? A Dynamic Constructivist Analysis," *Social Cognition* 19, no. 3: Special issue (2001): 324–49, <https://doi.org/https://doi.org/10.1521/soco.19.3.324.21475>.

<sup>17</sup> Muhammad Sahlan et al., "Pendekatan Budaya Dalam Resolusi Konflik Politik Aceh: Suatu Catatan Reflektif," *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)* 16, no. 1 (2022): 28–41.

Tabel 1. Perbedaan pendekatan struktural dan kultural dalam resolusi konflik sosial

No	Aspek	Pendekatan Struktural	Pendekatan Kultural
1	Fokus resolusi	Mengatasi akar konflik melalui perbaikan struktur sosial-ekonomi-politik, seperti pemerataan kesejahteraan dan penegakan hukum.	Mengedepankan pemahaman dan penghormatan terhadap nilai-nilai, norma, dan tradisi budaya setempat
2	Sasaran utama	Membenahi faktor struktural, seperti kesenjangan sosial, krisis identitas sipil, dan ketidakadilan politik.	Menekankan pentingnya harmoni sosial melalui dialog dan pemahaman budaya antar kelompok yang berkonflik.
3	Keterlibatan aktor	Mengedepankan peran institusi formal, seperti pemerintah dan lembaga hukum.	Melibatkan komunitas dan tokoh adat dalam proses penyelesaian konflik.

Sumber: Diolah dari Tulisan Masdar Hilmy, dalam buku Thoha Hamik, dkk, 2007: 25-31

Pendekatan integratif dalam penyelesaian konflik memiliki peranan penting untuk manajemen resolusi konflik sosial<sup>18,19</sup>. Menggunakan model struktural pada kelompok masyarakat yang tengah berkonflik memang sering kali dikembangkan untuk mengurai masalah dan mencegah konsekuensi konflik berkepanjangan. Hal ini cukup berdasar sebab penyebab konflik memang sering kali dilatarbelakangi faktor sosial politik maupun ekonomi seperti kesenjangan sosial dan krisis identitas sipil, sehingga tetap diperlukan pendekatan struktural dalam penyelesaiannya. Namun demikian, perspektif kultural tidak boleh dikesampingkan begitu saja dalam upaya resolusi konflik, sebab pendekatan budaya juga penting sebagai alternatif dalam

<sup>18</sup> Sahawiah Abdullah, "Social Conflict Management through Multicultural Approach and Policy in Preventing and Overcoming the Social Disintegration," *TAWARIKH* 5, no. 2 (2014).

<sup>19</sup> Svetlana A Lyausheva et al., "Models of Interethnic Relations Management in a Multicultural Society in the Context of Social Consequences of Globalization," *International Journal of Sociology and Social Policy* 41, no. 1/2 (2021): 85–91, <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/IJSSP-03-2020-0085>.

menyelesaikan realitas konflik pada sejumlah daerah di Indonesia<sup>20,21,22</sup>. Dengan mengintegrasikan kedua paradigma tersebut, maka hal ini dapat memperkaya praktik penyelesaian konflik dan berkontribusi pada upaya pembangunan perdamaian berkelanjutan.

Pendekatan struktural dalam resolusi konflik menitikberatkan pada upaya untuk mengatasi penyebab utama konflik yang seringkali berkaitan dengan ketidakadilan dalam sistem sosial, ekonomi, atau politik. Dalam masyarakat, konflik sering timbul ketika ada ketimpangan, misalnya akses terhadap sumber daya, kekuasaan, atau kesempatan yang tidak merata. Melalui pendekatan struktural, pemerintah atau pemangku kepentingan lainnya berusaha memperbaiki ketimpangan ini, seperti dengan menciptakan kebijakan yang lebih adil atau meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar. Upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan kondisi sosial yang lebih seimbang dan mengurangi risiko terjadinya konflik. Dalam konteks ini, lembaga formal seperti pemerintah dan penegak hukum memainkan peran penting untuk menjaga stabilitas dan mencegah konflik berkembang menjadi kekerasan.

Sementara itu, pendekatan kultural fokus pada nilai, norma, dan tradisi yang ada di dalam masyarakat untuk mengurai ketegangan sosial. Tradisi dan ritual yang ada, seperti Merenden Tedong di Mamasa, menjadi sarana penting dalam menjaga kerukunan dan menyelesaikan permasalahan secara damai. Nilai-nilai seperti saling menghargai, musyawarah, dan perdamaian menjadi pedoman dalam menyelesaikan konflik antarindividu atau kelompok. Melalui pendekatan ini, masyarakat diberikan ruang untuk berdialog dan menyelesaikan perbedaan dengan cara yang sesuai dengan budaya lokal, sehingga tercipta harmoni dan solidaritas antarwarga. Pendekatan kultural membantu menjaga keteraturan sosial dengan memperkuat hubungan antaranggota masyarakat dan memastikan bahwa setiap masalah diselesaikan secara damai, tanpa perlu melibatkan tindakan kekerasan atau perseteruan berkepanjangan.

Pendekatan kultural dan struktural dalam resolusi konflik memiliki fokus yang berbeda namun saling terkait, dan oleh karena itu, memadukan keduanya dalam proses resolusi konflik dapat meredakan mencuatnya konflik sosial keagamaan. Bila pendekatan kultural mempertimbangkan nilai, norma,

---

<sup>20</sup> Philipus Tule, "Religious Conflicts and a Culture of Tolerance: Paving the Way for Reconciliation in Indonesia," *Antropologi Indonesia* 63 (2014): 91-107.

<sup>21</sup> Tarja Väyrynen, "Culture and International Conflict Resolution: A Critical Analysis of the Work of John Burton," in *Culture and International Conflict Resolution* (Manchester University Press, 2018).

<sup>22</sup> Annisa Istiqomah and Delfiyan Widiyanto, "Resolusi Konflik Berbasis Budaya Tionghoa-Jawa Di Surakarta," *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 17, no. 1 (2020), <https://doi.org/DOI.10.21831/jc.v17i1.28754>.

dan identitas budaya yang mendasari konflik, sementara pendekatan struktural menyoroti faktor-faktor sosial, politik, ekonomi, dan institusional yang menjadi akar penyebab konflik, maka integrasi kedua pendekatan ini akan ditemukan model resolusi konflik yang sesuai dengan konteks kehidupan sosial masyarakat yang heterogen.

### **Merenden Tedong: Perpaduan Pendekatan Struktural dan Kultural dalam Resolusi Konflik**

Secara sederhana Merenden Tedong adalah suatu ritual sanksi sosial hukum adat yang mewajibkan si penerima sanksi untuk membawa atau memberi kerbau. Makna ini berasal dari suku kata *Ma'renden* (menarik) dan *Tedong* (Kerbau), yang secara leksikal bemakna membawa/menarik hewan Kerbau sebagai perwujudan sanksi sosial atas pelanggaran yang dilakukan. Dalam konteks ini, tindakan simbolis membawa binatang Kerbau memiliki makna pemulihan nama baik pihak seseorang atau keluarga terutama pihak yang dirugikan dalam sebuah masalah atau konflik<sup>23</sup>.

Merenden Tedong yang berarti memberi atau membawa kerbau adalah sebuah sanksi sosial dari pemangku adat terhadap orang yang dianggap bersalah karena melanggar suatu aturan adat setempat. Ritual Merenden Tedong dimaksudkan untuk menghukum orang yang bersalah sekaligus melakukan negosiasi terhadap pihak-pihak yang berkonflik sebagai upaya pemecahan masalah (*problem solving*). Ini dilaksanakan dalam rangka memulihkan hubungan yang rusak oleh karena konflik dimana hubungan yang dipulihkan bukan hanya bagi pihak yang sedang berkonflik, tetapi hubungan yang melibatkan keluarga dan masyarakat<sup>24</sup>.

Resolusi konflik dalam ritual Merenden Tedong terlihat dalam proses menangani pertentangan antara pihak-pihak yang berbeda kepentingan dengan cara yang damai dan konstruktif. Pendekatan semacam ini merupakan bentuk nyata dari manajemen dan resolusi konflik yang mengakomodir aspek budaya untuk mengakhiri konflik secara langsung dan mengatasi akar permasalahan yang mendasarinya<sup>25,26</sup>. Menurut Fisher, salah satu aspek kunci dari resolusi konflik adalah penggunaan strategi negosiasi, mediasi, atau intervensi pihak ketiga untuk mencapai kesepakatan yang bisa diterima oleh

---

<sup>23</sup> Izak and Tampake, "Ritual Merenden Tedong Sebagai Penyelesaian Konflik Masyarakat Mamasa."

<sup>24</sup> Izak and Tampake.

<sup>25</sup> Penny Kurnia Putri, "Manajemen Konflik Dan Resolusi Konflik: Sebuah Pendekatan Terhadap Perdamaian," *Papua Journal of Diplomacy and International Relations* 2, no. 1 (2022): 16–34, <https://doi.org/10.31957/pjdir.v2i1.1945>.

<sup>26</sup> Zaenuddin Hudi Prasajo and Mustaqim Pabbajah, "Akomodasi Kultural Dalam Resolusi Konflik Bernuansa Agama Di Indonesia," *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 5, no. 1 (2023), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30984/ajip.v5i1.1131>.



semua pihak terlibat<sup>27</sup>. Selain itu, resolusi konflik juga melibatkan upaya untuk membangun atau memulihkan hubungan yang rusak akibat konflik, serta untuk mencegah timbulnya konflik baru dengan memperbaiki tata kelola yang adil dan inklusif.

Sebagaimana diketahui, tradisi Merenden Tedong di Mamasa merupakan hukum adat yang lahir dari kebiasaan-kebiasaan dan terinternalisasi dalam kehidupan sosial budaya. Masyarakat Mamasa yang sangat menjunjung tinggi nilai adat istiadat, diikat oleh peraturan adat di mana peraturan adat menjadi sistem yang menuntun kehidupan seorang individu atau kelompok di kehidupan masyarakat. Bagi warga Mamasa, hukum dan adat kebiasaan dianggap sangat penting dalam masyarakat<sup>28</sup>. Hal tersebut karena tidak dimungkiri akan selalu muncul masalah di masyarakat, sehingga diharapkan anggota masyarakat tetap terjaga dari perpecahan. Dengan kata lain, perlu adanya keteraturan sosial agar setiap individu dapat berhubungan secara harmonis.

Dalam perspektif sosiologi, resolusi konflik yang dikembangkan dalam tradisi Merenden Tedong, bisa dipahami sebagai upaya untuk mengelola atau mengurangi ketegangan sosial yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan, nilai-nilai, atau tujuan antara individu maupun kelompok<sup>29</sup>. Praktik ritual Merenden Tedong lebih berfungsi sebagai sarana untuk membangun saluran komunikasi yang lebih efektif antara pihak-pihak yang bertikai guna mengakhiri pertikaian atau ketegangan sosial. Misalnya, terdapat ruang bagi pihak yang berkonflik untuk membangun dialog damai antara individu atau kelompok yang tengah berselisih. Ini mencakup keterlibatan tokoh-tokoh masyarakat sebagai mediator yang dihormati secara tradisional, yang memfasilitasi pembicaraan damai dan terbuka.

Hal menarik dalam proses resolusi konflik melalui ritual Merenden Tedong ialah, sanksi adat ini tetap memperhatikan aspek struktural sebagai upaya untuk mencapai keadilan. Sebagaimana diketahui bahwa resolusi konflik menggunakan pendekatan budaya bisa saja tidak efektif dalam mengatasi ketidakadilan atau ketidaksetaraan dalam penyelesaian masalah. Sebagai contoh kasus pembunuhan, ini tidak cukup hanya diselesaikan dengan pendekatan hukum adat, melainkan juga tetap diperlukan kehadiran lembaga penegak hukum untuk mengurai akar persoalan secara lebih berkeadilan, tepat dan akurat. Merenden Tedong tidak secara tertulis seperti hukum positif

---

<sup>27</sup> Ronald J Fisher, "Interactive Conflict Resolution: Addressing the Essence of Ethnopolitical Conflict and Peacebuilding 1," in *Routledge Handbook of Peacebuilding and Ethnic Conflict* (Routledge, 2022), 118–30.

<sup>28</sup> Wawancara dengan DD, tokoh adat Mamasa tanggal 22 Juli 2022 di Mamasa.

<sup>29</sup> Pandu Prasajo, "Memahami Pola Resolusi Konflik Kepentingan Di Indonesia," *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 3, no. 3 (2024): 287–93, <https://doi.org/https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v3i3.3930>.

(negara) namun sanksi adat ini tetap berjalan apabila ada salah satu pihak tetap ingin menyelesaikan permasalahan menggunakan lembaga adat. Di situasi ini, sering kali seseorang yang bersalah, sekalipun telah dihukum berdasarkan aturan undang-undang, ia tetap akan dikenakan sanksi adat walaupun jauh lebih banyak diselesaikan dengan jalan mediasi melalui lembaga adat.

Selain menghadirkan aparat penegak hukum dan sistem keamanan negara, dalam tradisi Merenden Tedong juga dibuka kran pranata demokrasi sebagai salah satu penciri pendekatan struktural resolusi konflik. Ini terlihat pada sanksi sosial adat diputuskan dengan melibatkan berbagai pihak seperti tokoh agama, pemerintah termasuk warga<sup>30</sup>. Hal lainnya adalah, sanksi sosial adat tersebut senantiasa didasarkan pada pandangan kehidupan bersama yang lebih manusiawi (*adat tuo*), yaitu setiap permasalahan akan dilakukan resolusi yang lebih mengedepankan jalan perdamaian, bukan dengan jalan kekerasan<sup>31</sup>. Dalam kehidupan sosial misalnya, segala perselisihan warga mesti diselesaikan secara baik-baik dengan mengedepankan musyawarah mufakat. Di sini, para tokoh masyarakat termasuk pemerintah desa dan adat setempat akan berunding mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah yang ada<sup>32</sup>.

Tabel 2. Integrasi pendekatan struktural dan kultural dalam tradisi Merenden Tedong di Mamasa

No	Aspek	Pendekatan Struktural	Pendekatan Kultural
1	Peran aktor	Melibatkan lembaga formal seperti pemerintah desa dan aparat penegak hukum untuk menjaga keteraturan dan keadilan.	Melibatkan pemangku adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sebagai mediator yang dihormati dalam penyelesaian konflik
2	Metode penyelesaian	Menggunakan sanksi sosial adat dengan mempertimbangkan pranata demokrasi yang melibatkan berbagai pihak.	Memanfaatkan ritual adat untuk menekankan perdamaian dan harmoni sosial, serta memulihkan hubungan masyarakat.

<sup>30</sup> Victor Silaen, *Prospek Demokrasi Di Negara Pancasila* (Jakarta: Permata Aksara, 2012).

<sup>31</sup> Wawancara dengan KR, tokoh pemuda Mamasa tanggal 22 Juli 2022 di Mamasa.

<sup>32</sup> Wawancara dengan RB, tanggal 23 Juli 2022. Menurut penuturan informan, sanksi adat Merenden Tedong memiliki nilai sosial yang diistilahkan masyarakat Mamasa sebagai *ada' tuo*, yaitu sistem hukum yang mengedepankan jalan damai, bukan jalan kekerasan.

3	Pengambilan keputusan	Mengedepankan peran institusi formal, seperti pemerintah dan lembaga hukum.	Melibatkan komunitas dan tokoh adat dalam proses penyelesaian konflik.
4	Karakteristik pendekatan	Memadukan antara sanksi adat dengan kebijakan formal untuk mencapai solusi yang lebih berkeadilan dan tepat sasaran.	Menjunjung tinggi nilai-nilai adat tua, yang mengutamakan jalan perdamaian dan penyelesaian konflik tanpa kekerasan.

Sumber: Diolah dari temuan dan informasi dari hasil wawancara

Dalam tradisi Merenden Tedong, pilihan-pilihan yang ditetapkan ialah pihak-pihak yang terlibat konflik selalu mengedepankan musyawarah. Oleh karena itu, pandangan terhadap sesuatu yang dianggap baik, patut, layak dan pantas menjadi pedoman utama dalam tata pemutusan sanksi sosial ritual. Dalam konteks ini, ritual Merenden Tedong mengintegrasikan dua pendekatan resolusi konflik. Prosesi Merenden Tedong tidak hanya melibatkan lembaga adat yang memperhatikan nilai-nilai, adat istiadat, dan aspirasi budaya masyarakat, tetapi juga adanya peran lembaga agama dan pemerintah. Di sini sangat jelas bahwa konteks budaya Merenden Tedong yang eksis sampai saat ini memadukan antara pendekatan kultural dan struktural dalam penyelesaian konflik di tengah-tengah masyarakat.

Pendekatan struktural dan kultural dalam resolusi konflik pada tradisi Merenden Tedong di Mamasa memperlihatkan perpaduan antara intervensi formal dan nilai-nilai tradisional yang saling melengkapi. Pendekatan struktural, seperti diuraikan oleh Galtung<sup>33</sup>, menekankan pentingnya menangani ketidakadilan sosial dan politik sebagai sumber utama konflik. Dalam konteks Merenden Tedong, melibatkan aparat pemerintah dan sistem keamanan negara menunjukkan bahwa masyarakat Mamasa tidak hanya mengandalkan norma adat, tetapi juga mengintegrasikan mekanisme formal untuk memastikan keadilan sosial tercapai. Pendekatan ini membantu mengatasi akar konflik yang disebabkan oleh ketidaksetaraan, serta menjaga stabilitas jangka panjang dengan menjamin adanya aturan yang mengikat semua pihak.

Sementara itu, pendekatan kultural yang diterapkan dalam Merenden tradisi Tedong menekankan pentingnya nilai-nilai lokal dan ritual adat dalam menjaga harmoni sosial. Nilai-nilai budaya memiliki peran penting dalam

<sup>33</sup> Andrew Dilts et al., "Revisiting Johan Galtung's Concept of Structural Violence," *New Political Science* 34, no. 2 (2012): e191-227, <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/07393148.2012.714959>.

membangun perdamaian yang berkelanjutan karena mereka lebih diterima oleh komunitas<sup>34</sup>. Tradisi Merenden Tedong, dengan musyawarah dan keterlibatan tokoh adat sebagai mediator, merupakan contoh nyata dari penggunaan nilai budaya untuk menyelesaikan konflik secara damai. Pendekatan kultural ini tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan konflik secara praktis, tetapi juga berfokus pada pemulihan hubungan sosial antarindividu dan antarkelompok yang terlibat, sehingga memberikan dasar yang lebih kokoh untuk perdamaian jangka panjang di tengah masyarakat. Integrasi kedua pendekatan ini telah menciptakan sebuah mekanisme resolusi konflik yang lebih komprehensif dan inklusif, serta memberikan ruang untuk menggabungkan efektivitas aturan formal dengan kedalaman nilai-nilai kultural dalam menciptakan perdamaian.

### **Kolaborasi Lembaga Adat dan Pemerintah Memitigasi Risiko Konflik Sosial Keagamaan**

Dalam kehidupan sosial, dinamika konflik tentu saja tidak dapat dihindarkan. Konflik yang paling sering mengemuka ialah muncul pada skala antar-orang (*interpersonal conflict*) dan konflik antar-kelompok (*intergroup conflict*)<sup>35</sup>. Namun, konflik yang bisa dikelola secara arif dan bijaksana akan mendinamisasi proses sosial dan bersifat konstruktif, sehingga para warga yang bersitegang terhindar dari kekerasan<sup>36, 37</sup>.

Upaya menjaga kebersamaan dalam kekeluargaan menjadi inspirasi utama masyarakat Mamasa yang termanifestasikan dalam ritual Merenden Tedong sebagai media menyemai kerukunan. Oleh karena itu, ritual ini menjadi penegasan bahwa masalah-masalah yang akan membawa warga Mamasa kepada pertikaian dan perpecahan mesti dibentengi dengan hukum adat untuk memulihkan disintegrasi menuju harmoni. Ritual Merenden Tedong menggunakan berbagai instrumen untuk menyelesaikan sekaligus mencegah potensi konflik sosial. Hal sederhana yang terlihat dari ritual ini yakni para tokoh masyarakat mempromosikan pentingnya kohesi sosial melalui pesan perdamaian, solidaritas serta persaudaraan yang dapat mencegah timbulnya konflik di kemudian hari.

Konsekuensi logis yang muncul di ranah ini ialah adat kebiasaan Merenden Tedong telah berfungsi memitigasi risiko konflik-konflik sosial.

---

<sup>34</sup> Catherine Goetze and Berit Bliesemann De Guevara, "Cosmopolitanism and the Culture of Peacebuilding," *Review of International Studies* 40, no. 4 (2014): 771-802, <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S026021051300051X>.

<sup>35</sup> Roger Mac Ginty, "Everyday Peace: Bottom-up and Local Agency in Conflict-Affected Societies," *Security Dialogue* 45, no. 6 (2014): 548-64.

<sup>36</sup> Thania Paffenholz, "Civil Society and Peacebuilding," *Development Dialogue* 63, no. 3 (2015): 108-18.

<sup>37</sup> Michalinos Zembylas, Constadina Charalambous, and Panayiota Charalambous, *Peace Education in a Conflict-Affected Society* (Cambridge University Press, 2016).

Kebersamaan sosial yang dibangun di atas nilai dan norma adat, telah berperan dalam membangun tatanan kehidupan bersama yang aman di mana adanya sanksi sosial adat, melahirkan kesadaran untuk “saling menghargai”. Dalam kondisi ini, masyarakat senantiasa menjaga toleransi, saling membantu dan bekerjasama dalam mewujudkan keamanan dan ketentraman di daerah Mamasa.

Sarana kebudayaan Merenden Tedong telah menciptakan ruang untuk meneguhkan komitmen kebersamaan. Hal semacam ini juga dapat ditemukan dalam pendekatan penyelesaian konflik masyarakat melalui budaya seperti Pela Gandong di Ambon<sup>38</sup>. Citra yang melekat pada tradisi ini adalah pentingnya menghormati harkat dan martabat semua manusia. Artinya, tidak semua orang boleh sewenang-wenang dan menciderai bahkan meremehkan orang lain; bahwa seluruh anggota masyarakat harus diberikan penghormatan tertinggi tanpa melihat latar belakang agama dan suku. Di situasi ini, Merenden Tedong menjadi modal kekayaan budaya yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan, yakni mempersatukan, memperdamaikan dan memperbaharui relasi dalam masyarakat<sup>39</sup>.

Sinergitas seluruh elemen masyarakat di Mamasa dalam memitigasi risiko konflik, menjadi kunci keberhasilan pengelolaan kerukunan di masyarakat. Melalui ritual Merenden Tedong, tercipta kolaborasi menyelesaikan persoalan yang timbul di tengah-tengah masyarakat yang efektif menghadirkan kerukunan sosial di masyarakat. Kerjasama sama ini dalam rangka menjawab berbagai dinamika persoalan yang dapat memecah belah integrasi masyarakat Mamasa.

Menurut penuturan sejumlah informan, ketika suatu permasalahan di antara anggota masyarakat terjadi namun mereka merasa tidak mampu menyelesaikannya sendiri, maka ada jalur penyelesaian lebih tinggi yang mereka akan tempuh. Tingkatan yang paling atas adalah melalui tokoh masyarakat, biasanya mereka akan berkoordinasi dengan pemimpin formal, seperti kepala desa. Tingkatan dibawahnya bisa melalui rukun keluarga setempat bersama kepala dusun. Dalam prosesnya, jika masalah tersebut masih bisa diselesaikan dengan aturan adat yang ada, maka persoalan tersebut tidak akan dimasukkan ke ranah hukum. Di sinilah menjadi pintu masuk kerja sama antara adat dan lembaga pemerintah seperti Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan kabupaten Mamasa menyelesaikan masalah warga dengan jalan mediasi sebagai perwujudan dari mitigasi konflik sosial.

---

<sup>38</sup> Hendry Bakri, “Resolusi Konflik Melalui Pendekatan Kearifan Lokal Pela Gandong Di Kota Ambon,” *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* 1, no. 1 (2015): 51–60.

<sup>39</sup> Izak and Tampake, “Ritual Merenden Tedong Sebagai Penyelesaian Konflik Masyarakat Mamasa.”

Potret lain yang melibatkan sinergi lembaga adat dan pemerintah ialah pembentukan “Banua Bicara” (Rumah Bermusyawarah) oleh Kejaksaan Negeri Mamasa di rumah-rumah adat. Rumah adat seperti Tongkonan yang selama ini menjadi ruang dialog menyelesaikan segala pelanggaran norma, kini dijadikan oleh kantor Kejaksaan Negeri Mamasa sebagai tempat penyelesaian masalah antarwarga. Ketika ada masalah sosial yang semestinya diselesaikan melalui pengadilan (hukum negara), maka tetap diupayakan diselesaikan di ranah hukum adat terlebih dahulu dengan mengedepankan penyelesaian masalah secara kekeluargaan, salah satunya melalui sanksi Merenden Tedong.

Menurut penuturan informan<sup>40</sup>, kehadiran lembaga adat yang dibentuk oleh pemerintah sangat efektif menjaga keharmonian di masyarakat. Lembaga ini pada akhirnya tidak hanya menjadi mitra pemerintah dalam menyelesaikan berbagai masalah-masalah sosial, tetapi juga memiliki kekuatan mengikat di masyarakat dengan perangkat norma-norma adat setempat, sehingga dengan adanya kerja sama antara kejaksaan dan lembaga adat tersebut, hal ini kemudian membuat warga menjauhkan diri dari tindakan-tindakan melanggar norma-norma sosial sebab segala tindakan yang menciderai orang lain akan berpotensi mendapat sanksi Merenden Tedong.

Pada level praktis, lembaga adat dan kejaksaan memiliki mekanisme dalam merespons setiap ketegangan antarwarga, khususnya yang terjadi di Mamasa. Dalam menyelesaikan masalah warga misalnya, dibuat program “*rumah restorative justice*”. Program ini bertujuan untuk mewedahi mediasi setiap permasalahan sosial melalui lembaga adat, sebuah kerjasama yang diinisiasi oleh pemerintah lokal untuk kepentingan perdamaian. Mitigasi konflik yang ditawarkan otoritas adat dan otoritas pemerintah sangat relevan menopang terselenggaranya perdamaian dan toleransi sosial di Mamasa. Menurut penuturan informan sejauh ini hukum adat selalu menjadi hukum pertama yang harus dilalui di Mamasa apabila melakukan kesalahan atau melanggar norma umum atau adat kebiasaan. Seorang ketua adat mempunyai otoritas penuh dapat mengeluarkan pernyataan atau keputusan untuk memberi sanksi terhadap semua warga yang bermukim di Mamasa apabila ada laporan dari individu yang merasa dirugikan. Bahkan lembaga adat kerap kali dipercayakan oleh lembaga kepolisian untuk mengambil alih penyelesaian berbagai masalah sosial yang timbul di masyarakat.

Bagi masyarakat Mamasa, ritual adat Merenden Tedong merupakan sesuatu yang sakral. Dalam keyakinan umum masyarakat, apabila pelanggaran adat tidak diindahkan, maka akan lahir petaka-petaka sosial yang lebih besar .

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Camat Aralle, Kabupaten Mamasa di Aralle, 10 September 2021, dan wawancara ulang 14 April 2024 di Polewali Mandar. Aralle merupakan salah satu pusat konflik di Kabupaten Mamasa yang penduduknya mayoritas Muslim.

Nilai-nilai spiritual tersebutlah yang mengilhami pikiran masyarakat, sehingga warga Mamasa senantiasa mematuhi dan memerhatikan norma-norma adat setempat<sup>41</sup>. Ini sejalan dengan pandangan Max Weber, bahwa bentuk dasarnya perilaku individu maupun kelompok dalam masyarakat dimotivasi oleh faktor-faktor religius atau magis yang sangat penting dalam ranah kehidupan sosial<sup>42</sup>.

Dengan demikian, adat kebiasaan Merenden Tedong disadari bahwa prosesi ritual ini digunakan sebagai mekanisme memitigasi konflik sosial, yang menggambarkan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan sebagai kebajikan universal seluruh anggota masyarakat untuk tatanan masyarakat yang damai. Dengan kata lain, ritual Merenden Tedong memungkinkan setiap individu membuka cara pandang untuk senantiasa menghormati orang lain, siap sedia bertindak adil, dan menciptakan kehidupan yang damai di atas norma-norma adat kebiasaan.

## **Kesimpulan**

Eksistensi tradisi Merenden Tedong di Mamasa merupakan modal sosial penyelesaian konflik di tengah-tengah masyarakat. Munculnya konflik di Mamasa di masa silam membuat ritual ini semakin dibutuhkan dalam upaya menjaga keharmonian hidup masyarakat. Dalam prosesnya, tradisi ini mampu menjadi media transformasi mitigasi konflik sosial keagamaan dalam rangka mewujudkan tatanan masyarakat Mamasa yang lebih damai. Oleh karena itu, strategi yang dilakukan dan paling mungkin dalam merawat toleransi sosial di Mamasa adalah melalui intensifikasi pendekatan struktural dan kultural dalam tradisi Merenden Tedong sebagai model pengembangan kerukunan dan pengendalian konflik sosial keagamaan.

Ritual Merenden Tedong sebagai salah satu instrumen resolusi konflik di Mamasa, sangat efektif menjadi model memitigasi konflik sosial. Ini lantaran pendekatan ini mampu mengatasi gejala konflik secara langsung. Tradisi ini telah membuka diri untuk merespons sejumlah problematika sosial kontemporer di lini kehidupan sosial sebagai upaya mencegah setiap anggota masyarakat terseret dalam arus pertentangan dan bahkan permusuhan antara kelompok. Pendekatan integratif ini pada akhirnya mampu membangun fondasi integrasi sosial di Mamasa yang lebih kuat untuk perdamaian yang berkelanjutan dan inklusif. Artikel ini merekomendasikan untuk melakukan

---

<sup>41</sup> Andi Nurkidam, "Ada Mappurondo Taboo: Ecological Wisdom of the Mamasa Community in Maintaining Natural Preservation," *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 16, no. 2 (2023): 153–67.

<sup>42</sup> Max Weber, *Sosiologi Agama A Handbook*, ed. Abdillah Halim, Terjemahan (Yogyakarta: IRCiSoD, 2012).

penelitian lanjutan terkait strategi mitigasi konflik melalui konstruksi identitas *Pitu Ulunna Salu* dalam membangun perdamaian di Mamasa.

## Ucapan Terimakasih

Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Parepare atas bantuan penelitian yang diberikan kepada tim penulis melalui program penelitian Litabdimas. Penulis juga menghaturkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada informan (tokoh adat, agama dan pemerintah serta warga) yang bersedia memberikan informasi dalam proses penggalan data oleh tim peneliti

## Daftar Pustaka

- Abdullah, Sahawiah. "Social Conflict Management through Multicultural Approach and Policy in Preventing and Overcoming the Social Disintegration." *TAWARIKH* 5, no. 2 (2014).
- Abdullah, Zulkifli. "Kontestasi Elit Lokal Dalam Konflik Politik Pemekaran Daerah (Studi Kasus Konflik Pemekaran Kabupaten Mamasa Di Sulawesi Barat)." Universitas Indonesia, 2016.
- Arjon, Sugit. "Conflict Management in Indonesia: Policy Perspective and Analysis." *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities* 8, no. 1 (2018): 1–10. [https://doi.org/Sugit Arjon, "Conflict Management in Indonesia: Policy Perspective and Analysis," Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities.](https://doi.org/Sugit%20Arjon,%20Conflict%20Management%20in%20Indonesia:%20Policy%20Perspective%20and%20Analysis)
- Arraiyah, Hamdar. "Menuju Damai Dengan Kearifan Baru (Studi Kasus Pasca Konflik Di Aralle, Tabulahan Dan Mambi)." *Al-Qalam* 11, no. 2 (2018): 26–42.
- Bakri, Hendry. "Resolusi Konflik Melalui Pendekatan Kearifan Lokal Pela Gandong Di Kota Ambon." *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* 1, no. 1 (2015): 51–60.
- Dilts, Andrew, Yves Winter, Thomas Biebricher, Eric Vance Johnson, Antonio Y Vázquez-Arroyo, and Joan Cocks. "Revisiting Johan Galtung's Concept of Structural Violence." *New Political Science* 34, no. 2 (2012): e191–227. [https://doi.org/https://doi.org/10.1080/07393148.2012.714959.](https://doi.org/https://doi.org/10.1080/07393148.2012.714959)
- Fisher, Ronald J. "Interactive Conflict Resolution: Addressing the Essence of Ethnopolitical Conflict and Peacebuilding 1." In *Routledge Handbook of Peacebuilding and Ethnic Conflict*, 118–30. Routledge, 2022.
- Ginty, Roger Mac. "Everyday Peace: Bottom-up and Local Agency in Conflict-Affected Societies." *Security Dialogue* 45, no. 6 (2014): 548–64.
- Goetze, Catherine, and Berit Bliesemann De Guevara. "Cosmopolitanism and the Culture of Peacebuilding." *Review of International Studies* 40, no. 4 (2014): 771–802. [https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S026021051300051X.](https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S026021051300051X)
- Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Fenomenologi; Kajian Filsafat Dan Ilmu Pengetahuan*. Malang: Literasi Nusantara, 2020.



- Harahap, Suheri. "Konflik Etnis Dan Agama Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (JISA)* 1, no. 2 (2018): 1-19. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30829/jisa.v1i2.5096>.
- Hilmy, Masdar. "Rekonstruksi Paradigma Teori Dan Resolusi Konflik Agama-Etnik: Sebuah Diskursus Teoritik." In *Resolusi Konflik Islam Indonesia*, edited by Thoha Hamim, 25-35. Yogyakarta: PT. LKis Pelangi Aksara, 2007.
- Istiqomah, Annisa, and Delfiyan Widiyanto. "Resolusi Konflik Berbasis Budaya Tionghoa-Jawa Di Surakarta." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 17, no. 1 (2020). <https://doi.org/DOI.10.21831/jc.v17i1.28754>.
- Izak, Lattu;, and Tony Tampake. "Ritual Merenden Tedong Sebagai Penyelesaian Konflik Masyarakat Mamasa." *Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya* 5, no. 2 (2020): 123-35. <https://doi.org/10.24114/antro.v5i2.14392>.
- Karaeng, Agustinus Buntu, and Elly Esra Kudubun. "Ritual Ma'renden Tedong Sebagai Penyelesaian Konflik Masyarakat Sesenapadang." *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 4 (2024): 4242-48. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i4.4381>.
- Lyausheva, Svetlana A, Azamat M Shadzhe, Marina A Igosheva, and Victoria V Kotlyarova. "Models of Interethnic Relations Management in a Multicultural Society in the Context of Social Consequences of Globalization." *International Journal of Sociology and Social Policy* 41, no. 1/2 (2021): 85-91. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/IJSSP-03-2020-0085>.
- Mahyuddin, Mahyuddin, and Muhammad Zaldy Febry. "Representasi Identitas Agama Dalam Pilkada Sebagai Media Resolusi Konflik Etnoreligius Di Mamasa." *Palita: Journal of Social Religion Research* 8, no. 1 (2023): 109-24. <https://doi.org/10.24256/pal.v8i1.3587>.
- Maryanah, Tabah. "Governance Dalam Manajemen Konflik Pemekaran Kabupaten Mamasa." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan* 4, no. 1 (2013): 7-16.
- Morris, Michael W, and Ho-Ying Fu. "How Does Culture Influence Conflict Resolution? A Dynamic Constructivist Analysis." *Social Cognition* 19, no. 3: Special issue (2001): 324-49. <https://doi.org/https://doi.org/10.1521/soco.19.3.324.21475>.
- Nurkidam, Andi. "Ada'Mappurondo Taboo: Ecological Wisdom of the Mamasa Community in Maintaining Natural Preservation." *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 16, no. 2 (2023): 153-67.
- Paffenholz, Thania. "Civil Society and Peacebuilding." *Development Dialogue* 63, no. 3 (2015): 108-18.
- Prasojo, Pandu. "Memahami Pola Resolusi Konflik Kepentingan Di Indonesia." *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 3, no. 3 (2024): 287-93. <https://doi.org/https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v3i3.3930>.
- Prasojo, Zaenuddin Hudi, and Mustaqim Pabbajah. "Akomodasi Kultural Dalam Resolusi Konflik Bernuansa Agama Di Indonesia." *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 5, no. 1 (2023).

- <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30984/ajip.v5i1.1131>.
- Putri, Penny Kurnia. "Manajemen Konflik Dan Resolusi Konflik: Sebuah Pendekatan Terhadap Perdamaian." *Papua Journal of Diplomacy and International Relations* 2, no. 1 (2022): 16–34. <https://doi.org/10.31957/pjdir.v2i1.1945>.
- Roni Ismail. "Resolusi Konflik Keagamaan Integratif: Studi Atas Resolusi Konflik Keagamaan Ambon." *Journal of Islamic Discourses* 3, no. 2 (2021): 451–69. <https://doi.org/doi.org/10.14421/lijid.v3i2.2458>.
- Sahlan, Muhammad, Iromi Ilham, Khairul Amin, and Ade Ikhsan Kamil. "Pendekatan Budaya Dalam Resolusi Konflik Politik Aceh: Suatu Catatan Reflektif." *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)* 16, no. 1 (2022): 28–41.
- Silaen, Victor. *Prospek Demokrasi Di Negara Pancasila*. Jakarta: Permata Aksara, 2012.
- Stepanus, Stepanus, Izak Y M Lattu, and Tony Tampake. "Mebulle Bai: Ritual, Ruang Bersama, Dan Rekonsiliasi Masyarakat Lokal Di Mamasa, Sulawesi Barat." *Religió Jurnal Studi Agama-Agama* 9, no. 2 (2019): 170–96. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/religio.v9i2.1204>.
- Susan, Novri. *Pengantar Sosiologi Konflik Dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Tule, Philipus. "Religious Conflicts and a Culture of Tolerance: Paving the Way for Reconciliation in Indonesia." *Antropologi Indonesia* 63 (2014): 91–107.
- Vallone, Federica, Elena Dell'Aquila, Pasquale Dolce, Davide Marocco, and Maria Clelia Zurlo. "Teachers' Multicultural Personality Traits as Predictors of Intercultural Conflict Management Styles: Evidence from Five European Countries." *International Journal of Intercultural Relations* 87 (2022): 51–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2022.01.006>.
- Väyrynen, Tarja. "Culture and International Conflict Resolution: A Critical Analysis of the Work of John Burton." In *Culture and International Conflict Resolution*. Manchester University Press, 2018.
- Weber, Max. *Sosiologi Agama A Handbook*. Edited by Abdillah Halim. Terjemahan. Yogyakarta: IRCiSoD, 2012.
- Zembylas, Michalinos, Constadina Charalambous, and Panayiota Charalambous. *Peace Education in a Conflict-Affected Society*. Cambridge University Press, 2016.